

**TESIS**

**STUDI TENTANG DIVERGENSI HUKUM PIDANA  
DENGAN HUKUM ADMINISTRASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

**HENDRI JONI**  
BP. 2120113012

Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Elwi Danil SH.,M.H. (Ketua)**  
**Dr. Yuslim, S.H.,M.H. (Anggota)**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

# STUDI TENTANG DIVERGENSI HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: **HENDRI JONI**

(Bimbingan: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH, dan Dr. Yuslim, SH., MH)

## ABSTRAK

Sampai hari ini, silang pendapat dan bahkan perdebatan terkait penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi masih belum menemukan titik kesepahaman, khususnya terkait dengan unsur melawan hukum dalam regulasi tindak pidana korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam regulasi administrasi negara. Berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* ini, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kompetensi absolut Peradilan Administrasi, karena kompetensi absolut yang dimiliki Peradilan Administrasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apa sajakah penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat simpulkan *pertama*, faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. *Kedua*, Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi. Untuk perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini terjadinya kerugian keuangan negara. Sementara penyalahgunaan wewenang, cenderung mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan kategori pelanggaran yang bersifat administratif. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung RI melakukan sosialisasi atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang, sehingga hakim-hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki perspektif yang sama terkait “penyalahgunaan kewenangan” sehingga tidak terjadi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Divergensi, *Korupsi*, *penyalahgunaan wewenang*.

# STUDY ON THE DIVERGENCE OF CRIMINAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW IN CORRUPTION CRIMES

By: **HENDRI JONI**

supervising team: Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH., Dr. Yuslim, SH.,MH.

## ABSTRACT

*To this day, disagreements and even debates regarding the determination of jurisdiction between State Administrative Law and Criminal Law, especially in the field of corruption crimes, have still not found a point of understanding, especially regarding the element of breaking the law in the regulation of criminal acts of corruption and the element of abusing authority in state administration regulations. Based on the legal principle of *lex posteriori derogate legipriori*, the authority to examine and decide on abuse of authority in Corruption Crimes is the absolute competence of the Administrative Court, because the absolute competence of the Administrative Court is granted by Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which was formed after the enactment of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The formulation of the problem in this research is (1) What factors cause the divergence of criminal law and administrative law in criminal acts of corruption? (2) What is the development of the practice and jurisprudence of the divergence of criminal law from administrative law in enforcing criminal offenses of corruption, especially in corruption trials? The approach method used in this research is the Normative juridical method. The research type is descriptive. The data source is primary data and supported by secondary data. Based on the research results, the author can conclude firstly, the factors causing the divergence of criminal law and administrative law in criminal acts of corruption are due to the emergence of two understandings; namely abuse of authority and unlawful acts. Second, the development of practice and jurisprudence on the divergence of criminal law from administrative law in enforcing criminal offenses of corruption, especially in corruption trials, is largely determined by the judge's confidence in deciding a corruption case. Acts against the law tend to result in losses for other parties, in this context, state financial losses occur. Meanwhile, abuse of authority tends to lead to personal losses in the category of administrative violations. This research suggests that the Supreme Court of the Republic of Indonesia carry out socialization on the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 concerning Procedure Guidelines in Testing for Abuse of Authority, so that judges at the Corruption Crime Court have the same perspective regarding "abuse of authority" so that there is no divergence in criminal law. with administrative law in criminal acts of corruption.*

**Keywords:** *Divergence, Corruption, abuse of authority.*